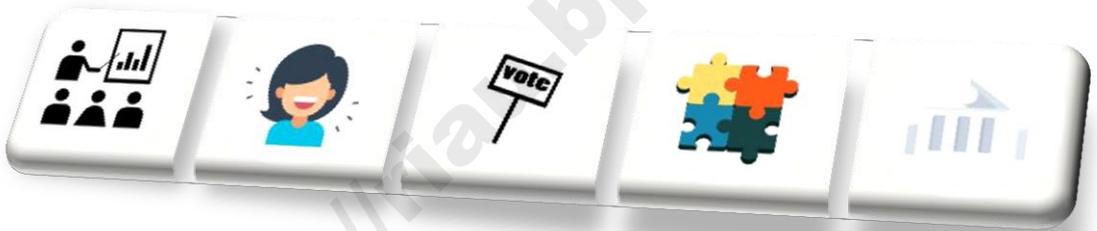


PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2015

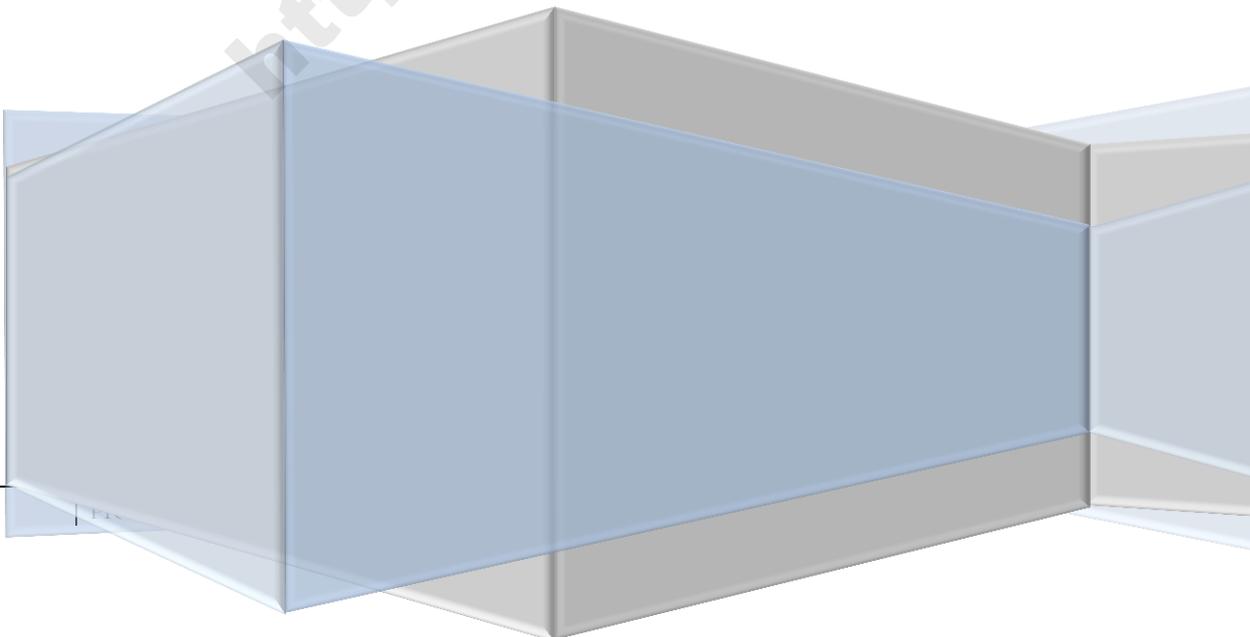


**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2015



<http://riaubps.go.id>



Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2015

ISBN: 978-602-17820-1-9

No. Publikasi : 14520.1602

Katalog BPS : 4601004.14

Ukuran Buku : 17 Cm x 24 Cm

Jumlah Halaman : 60

Naskah :

Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2015 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau berisi berbagai data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Provinsi Riau. Publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2015 diterbitkan untuk melengkapi publikasi-publikasi yang sudah terbit secara rutin setiap tahun.

Materi yang disajikan dalam Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2015 ini, terutama didasarkan atas hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang memuat berbagai informasi mengenai indikator-indikator demokrasi yang digunakan sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas di Provinsi Riau. IDI memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi pada tingkat provinsi. Melalui IDI, keadaan demokrasi di Provinsi Riau relatif dapat digambarkan dengan lebih jelas. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan, terutama di bidang politik.

Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Pekanbaru, November 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau



Ir. Aden Gultom, MM

Organisasi Penulisan

Pengarah :

Ir. Aden Gultom, MM

Editor :

Siti Mardiyah, MA

Emilia Dharmayanthi, SST

Penulis :

Iswenda Noviani, SST

Emilia Dharmayanthi, SST

Pengolah Data :

Iswenda Noviani, SST

Hanifah, SST

Setting :

Iswenda Noviani, SST

Dwijotulus Saputro, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Organisasi Penulisan	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Perkembangan Demokrasi Global	3
1.2 Urgensi Demokrasi di Indonesia	3
1.2.1 Apa Itu IDI?	4
1.2.2 Mengapa IDI Diperlukan?	5
1.3 Konsep dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia	6
1.3.1 Kerangka Konseptual IDI	6
1.3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil (<i>Civil Liberties</i>)	7
1.3.1.2 Aspek Hak-Hak Politik (<i>Political Rights</i>)	8
1.3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi (<i>Institutions of Democracy</i>)	8
1.3.2 Metodologi IDI	10
1.3.2.1 Review Media dan Dokumen	11
1.3.2.2 <i>Focused Group Discussion</i> (FGD)	12
1.3.2.3 <i>Indepth Interview</i>	12
1.3.3 Skala Kinerja Demokrasi	13
BAB II PROFIL IDI RIAU TAHUN 2015	19
2.1 Dinamika IDI Provinsi Riau Tahun 2015	21
2.2 Indeks Kebebasan Sipil	23
2.2.1 Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	25

2.2.2	Variabel Kebebasan Berpendapat	27
2.2.3	Variabel Kebebasan Berkeyakinan	28
2.2.4	Variabel Kebebasan dari Diskriminasi	29
2.3	Indeks Hak-Hak Politik	30
2.3.1	Variabel Hak Memilih dan Dipilih	31
2.3.2	Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	34
2.4	Indeks Lembaga Demokrasi	35
2.4.1	Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil	38
2.4.2	Variabel Peran DPRD	39
2.4.3	Variabel Peran Partai Politik	40
2.4.4	Variabel Peran Birokrasi Pemerintah	41
2.4.5	Variabel Peran Peradilan yang Independen	43
BAB III	KESIMPULAN	45
	DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Variabel dan Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil 14
Tabel 1.2	Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-Hak Politik 16
Tabel 1.3	Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi 17
Tabel 2.2.1	Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil ... 25
Tabel 2.2.2	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 26
Tabel 2.2.3	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berpendapat 27
Tabel 2.2.4	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkeyakinan 28
Tabel 2.2.5	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan dari Diskriminasi ... 29
Tabel 2.3.1	Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik ... 31
Tabel 2.3.2	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Hak Memilih dan Dipilih 32
Tabel 2.3.3	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 35
Tabel 2.4.1	Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi 36
Tabel 2.4.2	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil 38
Tabel 2.4.3	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran DPRD 40
Tabel 2.4.4	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Partai Politik 41
Tabel 2.4.5	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Birokrasi Pemerintah 42
Tabel 2.4.6	Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Peradilan yang Independen 43

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1.1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau, 2012 – 2014 21
Grafik 2.1.2	Sebaran Nilai Aspek IDI Provinsi Riau, 2012 – 2014 22
Grafik 2.3.1	Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel “Hak Memilih dan Dipilih” yang terkait Pemilihan Umum, 2009 – 2014 34
Grafik 2.4.1	Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel “Pemilu yang Bebas dan Adil” yang terkait Pemilihan Umum, 2009 – 2014 39



PENDAHULUAN

<http://riaindonesia.bps.go.id>

WHAT'S??

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang country specific: yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia



Mengapa IDI Diperlukan?

Pertama, secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia.

Kedua, bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi. Data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

SKALA KINERJA DEMOKRASI

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi, digunakan skala 1 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

- > Kinerja demokrasi "Baik" (indeks > 80)
- > Kinerja demokrasi "Sedang" (indeks 60 – 80)
- > Kinerja demokrasi "Buruk" (indeks < 60)



1.1 Perkembangan Demokrasi Global

Akhir-akhir ini masyarakat dunia menjadi saksi dua fenomena menarik terkait dengan perkembangan demokrasi global. *Pertama*, terjadinya gelombang besar demokratisasi yang melanda sejumlah negara yang sebelumnya dikenal tidak bersahabat atau bahkan resisten terhadap ide-ide demokrasi, misalnya negara-negara di kawasan Timur Tengah. Fenomena yang sering disebut sebagai *The Arab Spring* ini telah menurunkan rezim-rezim otoriter di Tunisia, Mesir, dan Libya. Gelombang ini merefleksikan kecenderungan global yang kuat untuk menerima demokrasi sebagai pilihan sistem politik dan pemerintahan yang sah.

Kedua, pada kurun waktu yang sama, banyak negara yang telah melalui proses demokratisasi pada gelombang sebelumnya justru mengalami kemerosotan kualitas demokrasi. Kecenderungan kedua ini membawa sejumlah ahli pada kesimpulan bahwa sedang terjadi resesi demokrasi (*democratic recession*) atau penurunan kualitas demokrasi (*democratic decline*). Penurunan kualitas demokrasi ini merupakan konsekuensi dari lambatnya konsolidasi.

1.2 Urgensi Indeks Demokrasi di Indonesia

Dalam dua dasawarsa terakhir, pengukuran demokrasi menjadi topik hangat di kalangan akademik serta pemerhati dan praktisi pembangunan. Gelombang demokratisasi global telah menjadikan separuh penduduk dunia kini hidup dalam sistem demokrasi, dengan berbagai variasi pada tataran praktiknya. Oleh karena itu muncul kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana demokratisasi telah berjalan serta melakukan perbandingan antar-negara.

Indonesia, yang menjalani transisi demokrasi besar-besaran, sering disebut sebagai *big bang transition*; juga merasakan kebutuhan ini. Bahkan, dengan variasi antar-daerah yang sangat lebar, kebutuhan ini menjadi sangat terasa. Indonesia perlu mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di tingkat daerah karena keberhasilannya sebagai negara demokratik akan sangat tergantung pada sejauh mana demokrasi berkembang dan diterapkan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

1.2.1 Apa Itu IDI?

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*, yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia.

Empat prinsip dasar penyusunan IDI antara lain:

1. IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi.
2. IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi.
3. IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat.
4. IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas.

1.2.2 Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah berakhirnya Orde Baru yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi penyelenggaraan negara. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya, karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lain yang lebih tepat untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter.

Sekarang, setelah tujuh belas tahun berjalan sejak Reformasi, muncul pertanyaan sejauh mana sesungguhnya perkembangan demokrasi ini, khususnya pada tingkat provinsi. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif. Keberadaan pengukuran seperti ini juga diharapkan memicu *diskursus* di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

IDI dibuat dengan provinsi sebagai unit analisa. Dengan kata lain, IDI adalah suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya bagaimana kondisi atau status perkembangan demokrasi politik pada tingkat provinsi di Indonesia. Dengan demikian, IDI merupakan potret demokrasi pada tingkat provinsi.

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat. *Pertama*, secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang

mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Keberadaan IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Kedua, bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi. Data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses *deliberasi* perumusan kebijakan dan program pembangunan politik atau proses demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.

1.3 Konsep dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia

Bab ini akan menyajikan konseptualisasi dan konstektualisasi demokrasi dalam rangka membangun Indeks Demokrasi Indonesia.

1.3.1 Kerangka Konseptual IDI

Secara sederhana, definisi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ditandai antara lain oleh adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam menyusun IDI disepakati tiga aspek yang dijadikan objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah

Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak Politik (*Political Rights*), dan Kelembagaan Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut tidak mungkin akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah”, struktur, dan prosedur pendukung, maka Kelembagaan Demokrasi juga dianggap sebagai aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, dalam penyusunan IDI kelembagaan demokrasi didudukkan sebagai aspek ketiga.

1.3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

Secara sederhana, kebebasan sipil dapat didefinisikan sebagai kebebasan individu/warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu/warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian, dalam konteks IDI, kebebasan sipil yang akan dilihat dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut:

- 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
- 2) Kebebasan Berpendapat,
- 3) Kebebasan Berkeyakinan,

4) Kebebasan dari Diskriminasi.

Sementara pada tingkat indikator, terdapat 10 (sepuluh) indikator dalam aspek Kebebasan Sipil ini, yang terdiri dari dua indikator pada variabel pertama dan kedua, serta masing-masing tiga indikator pada variabel ketiga dan keempat.

1.3.1.2 Aspek Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

Political Rights merupakan indikator demokrasi politik yang cukup lengkap, mencakup partisipasi dan kompetisi. Dalam konteks IDI, Hak-Hak Politik diturunkan ke dalam dua variabel yakni:

- 1) Hak Memilih dan Dipilih,
- 2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan.

Sementara pada tingkat indikator, aspek Hak-Hak Politik memiliki tujuh indikator yang terdiri dari lima indikator pada variabel pertama, dan 2 indikator pada variabel kedua.

1.3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin dapat teraktualisasi secara maksimal tanpa didukung oleh lembaga demokrasi. Atas dasar pertimbangan ini, cukup beralasan bila beberapa akademisi telah mengartikulasi lembaga demokrasi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari kebebasan sipil dan hak-hak politik.

Mengingat begitu krusialnya peran dari lembaga demokrasi tersebut, maka bagi mereka yang berafiliasi dengan perspektif ini acapkali mengatakan bahwa satu di antara yang membedakan antara demokrasi dan anarki adalah karena kebebasan sipil dalam praktik demokrasi dilakukan secara institusional, atau dengan kata lain didasarkan pada aturan, norma, prosedur dan kelembagaan yang telah disepakati secara bersama.

Pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara. Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis.

Dengan merujuk sejumlah elemen dari institusi demokrasi, untuk tujuan pengukuran IDI, aspek Lembaga Demokrasi pun telah dioperasionalkan ke dalam sejumlah variabel berikut:

- 1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil,
- 2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
- 3) Peran Partai Politik,
- 4) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah,
- 5) Peradilan yang Independen.

Pada tingkat indikator, aspek Lembaga Demokrasi diturunkan ke dalam sembilan indikator, dengan rincian dua indikator pada variabel pertama, ketiga, keempat, dan kelima, serta tiga indikator pada variabel kedua.

Dengan demikian, secara keseluruhan, komponen yang membentuk IDI 2015 terdiri atas 3 Aspek, 11 Variabel, dan 28 Indikator. Informasi lebih rinci

tentang indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3.

1.3.2 Metodologi IDI

Pada tingkat yang paling kongkrit, IDI melalui indikator-indikator dari ketiga aspek penting demokrasi, menilai apakah ada aturan, situasi atau kejadian yang mencerminkan ada atau tidak adanya, berkembang atau terhambatnya demokrasi di suatu provinsi. Kondisi demokrasi di suatu daerah dapat dimanifestasikan dalam berbagai indikator, seperti aturan-aturan yang ada, perilaku masyarakat, dan sebagainya.

Selanjutnya berbagai indikasi keadaan demokrasi ini dapat ditangkap melalui berbagai medium seperti dokumen-dokumen resmi, laporan di media masa (cetak maupun elektronik), serta dalam opini masyarakat yang hidup di tempat itu. Dengan demikian ada berbagai data yang mungkin digunakan untuk menangkap kondisi demokrasi, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif.

Menjawab tantangan metodologis di atas, IDI menggunakan metode Triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Sehubungan dengan itu, ada empat metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu: *review media*/telaah media (analisis isi berita surat kabar), *review document* (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), *Focused Group Discussion* (FGD) atau diskusi terarah terbatas, dan *indepth interview* (wawancara mendalam).

1.3.2.1 Review Media dan Dokumen

Review media dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan satu tahun) berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI.

Surat kabar atau koran diyakini sebagai sumber informasi yang paling relevan dalam merekam kehidupan daerah, termasuk didalamnya denyut demokrasi atau proses demokratisasi, selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari.

Dalam konteks penyusunan IDI, persyaratan yang pertama merujuk pada aspek, variabel, dan indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan media yang dimaksud adalah surat kabar terkemuka di Provinsi Riau. Sementara untuk jenis dokumen, yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD –seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan DPRD serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian dan data pemilih.

1.3.2.2 *Focused Group Discussion (FGD)*

Secara umum, tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjangkang data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI adalah *pertama*, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data kuantitatif berkaitan dengan

indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui review media dan dokumen.

Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. *Ketiga*, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.

1.3.2.3 *Indepth Interview*

Pada konteks penyusunan IDI, wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui *review* media dan dokumen serta FGD. Karena itu, *indepth interview* bukan merupakan metode utama dalam proses pengumpulan data melainkan sebagai komplementer karena melengkapi ketiga metode lainnya.

Dengan peran seperti ini, *indepth interview* baru dilakukan setelah FGD berlangsung guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD. Kendati *indepth interview* bersifat komplementer terhadap metode pengumpulan data lainnya, namun memiliki peran yang tidak kalah penting karena berperan sebagai “pos” terakhir dalam pengumpulan data kualitatif.

Keterkaitan empat metode di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dua metode pertama (review media dan dokumen) berperan sebagai basis utama dalam pengumpulan data kuantitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya, data kuantitatif melalui review media dan dokumen

diverifikasi dan dielaborasi dengan data kualitatif yang dikumpulkan melalui dua metode berikutnya (FGD dan *indepth interview*).

1.3.3 Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi di Provinsi Riau, digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Kinerja terendah (nilai indeks = 0) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, kinerja tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi (skor 5).

Selanjutnya untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks antar provinsi yang dihasilkan, skala 0 – 100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu "**baik**" (indeks > 80), "**sedang**" (indeks 60 – 80) dan "**buruk**" (indeks < 60).

Tabel 1.1

Variabel dan Indikator pada Aspek Kebebasan Sipil

Variabel I : Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Indikator 1

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Indikator 2

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Variabel II : Kebebasan Berpendapat

Indikator 3

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

Indikator 4

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Variabel III : Kebebasan Berkeyakinan

Indikator 5

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya.

Indikator 6

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya.

Indikator 7

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.

Variabel IV: Kebebasan dari Diskriminasi

Indikator 8

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Indikator 9

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Indikator 10

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Tabel 1.2

Variabel dan Indikator pada Aspek Hak-Hak Politik

Variabel V : Hak Memilih dan Dipilih

Indikator 11

Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat.

Indikator 12

Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih.

Indikator 13

Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Indikator 14

Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*).

Indikator 15

Jumlah perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

Variabel VI : Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Indikator 16

Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan.

Indikator 17

Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 1.3**Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi****Variabel VII : Pemilu yang Bebas dan Adil****Indikator 18**

Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu.

Indikator 19

Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Variabel VIII : Peran DPRD**Indikator 20**

Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap Total APBD.

Indikator 21

Jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.

Indikator 22

Rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Variabel IX : Peran Partai Politik**Indikator 23**

Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.

Indikator 24

Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.

Variabel X: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

Indikator 25

Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif.

Indikator 26

Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif.

Variabel XI: Peran Peradilan yang Independen

Indikator 27

Keputusan hakim yang kontroversial.

Indikator 28

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

2

PROFIL IDI RIAU
Tahun 2015

<http://riauhps.go.id>

PROFIL

Demokrasi Riau

2015

VARIABEL

2015



Kebebasan Sipil

66,46



Hak-Hak Politik

66,61



Lembaga Demokrasi

63,80

Bab ini menguraikan hasil Indeks demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau Tahun 2015. Secara berturut-turut akan disampaikan hasil Indeks Provinsi yang merupakan rata-rata capaian Indeks Aspek Kebebasan Sipil, Indeks Aspek Hak-hak Politik dan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi.

2.1 Dinamika IDI Provinsi Riau Tahun 2015

Pada tahun 2015, nilai capaian Indeks Demokrasi Provinsi Riau adalah 65,83. Nilai ini merupakan sumbangan dari ketiga aspek yang diukur yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Dalam skala pengukuran IDI yang berkisar dari 0 sampai dengan 100, nilai indeks Provinsi Riau di atas menunjukkan bahwa kualitas kinerja demokrasi di Provinsi Riau masih tergolong "sedang". Untuk membandingkan capaian indeks demokrasi Provinsi Riau Tahun 2009-2015, dapat dilihat pada Grafik 2.1.1.

Grafik 2.1.1

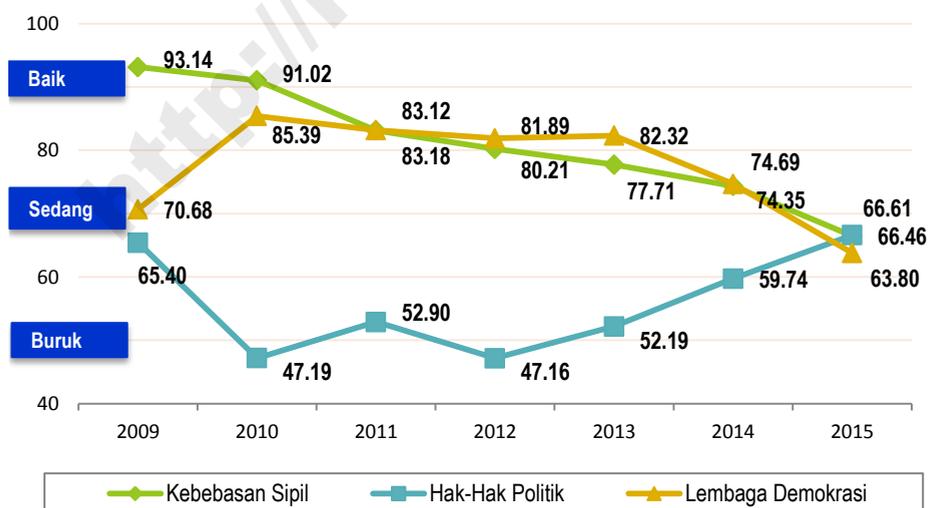
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau, 2009-2015



Bila dibandingkan dengan capaian indeks demokrasi Provinsi Riau pada tahun 2013 (68,37) dan tahun 2014 (68,40), pada tahun 2015 (65,83) nilai indeks Provinsi Riau berfluktuasi naik turun akan tetapi belum mengubah kategori kualitas capaian kinerja demokrasi menjadi kategori "baik". Indeks demokrasi tersebut merupakan perkiraan berdasarkan metodologi yang valid dari kinerja demokrasi di Provinsi Riau.

Grafik 2.1.2 menunjukkan sebaran dan perbandingan nilai capaian Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi tahun 2015. Pola sebaran capaian ketiga aspek setiap tahun tidak sama. Pada tahun 2015, Lembaga Demokrasi merupakan aspek dengan nilai capaian paling tinggi, diikuti Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik.

Grafik 2.1.2
Sebaran Nilai Capaian Aspek IDI Provinsi Riau, 2009-2015



Capaian aspek Lembaga Demokrasi tahun 2015 perlu mendapat perhatian khusus, karena untuk pertama kali sejak tahun 2009 hingga 2015, indeks aspek Lembaga Demokrasi Provinsi Riau mencapai angka terendah, dan sejak tahun 2014 terjadi penurunan kategori kualitas Lembaga Demokrasi, dari kualitas "baik" menjadi "sedang". Capaian aspek Kebebasan Sipil tahun 2015 juga tergolong dalam kategori "sedang"; sementara capaian aspek Hak-hak Politik sejak tahun 2009 terus mengalami peningkatan dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2015. Capaian kualitas Hak-Hak Politik di tahun 2015 juga meningkat dari tahun 2014 menjadi kategori "sedang".

Bila dilihat kecenderungan indeks dalam ketiga aspek, aspek Kebebasan Sipil terus menunjukkan penurunan dari 80,21 pada tahun 2012 menjadi 66,46 pada tahun 2015. Aspek Hak-Hak Politik sebaliknya, justru terus menunjukkan peningkatan dari 47,16 pada tahun 2012 menjadi 66,61 pada tahun 2015. Sementara aspek Lembaga Demokrasi juga menunjukkan penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2015.

2.2 Indeks Kebebasan Sipil

Aspek Kebebasan Sipil IDI mengukur kebebasan individu dan kelompok dalam kaitannya dengan kekuasaan negara dan atau kelompok. Dengan kata lain, IDI tidak mengukur tingkat kebebasan individu atau warga negara dari individu atau warga negara lainnya.

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil IDI 2015 Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 7,89 poin, dari 74,35 pada tahun 2014 menjadi 66,46 pada tahun 2015, yang berarti nilai indeks aspek Kebebasan Sipil hanya mencapai kategori "sedang". Penurunan nilai indeks ini perlu dicermati karena

untuk pertama kalinya pada tahun 2015, nilai indeks aspek Kebebasan Sipil meluncur hingga ke angka 60, walaupun kualitas kinerja aspek Kebebasan Sipil masih tetap berada pada kategori “sedang”.

Nilai indeks aspek Kebebasan Sipil Tahun 2015 dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yaitu: variabel “Kebebasan Berkumpul dan Berserikat” (100,00), “Kebebasan Berpendapat” (65,29), “Kebebasan Berkeyakinan” (64,14), dan “Kebebasan dari Diskriminasi” (60,80). Dibanding IDI 2014, nilai indeks keempat variabel dalam aspek Kebebasan Sipil IDI 2015, satu variabel mengalami peningkatan yaitu variabel Kebebasan Berpendapat, dua variabel tidak mengalami perubahan yaitu variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat dan variabel Kebebasan dari Diskriminasi. Sementara variabel Kebebasan Berkeyakinan mengalami penurunan indeks.

Tabel 2.2.1 menggambarkan sebaran nilai keempat variabel pada aspek Kebebasan Sipil IDI 2015 serta perbandingannya dengan IDI 2014, dan 2013. Hasil IDI 2015 dibandingkan dengan hasil IDI 2014, capaian nilai indeks aspek Kebebasan Sipil di Provinsi Riau turun 7,89 poin, dan penurunan nilai indeks tersebut disumbang oleh variabel Kebebasan Berkeyakinan yang indeksnya turun paling drastis, sebanyak 18,15 poin. Sementara variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat tidak mengalami perubahan, variabel Kebebasan Berpendapat naik 29,17 poin dan variabel Kebebasan dari Diskriminasi juga tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.2.1

Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil

Variabel	2013	2014	2015
		77.71	74.35
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	98.75	100.00	100.00
Kebebasan Berpendapat	90.00	36.12	65.29
Kebebasan Berkeyakinan	79.47	82.29	64.14
Kebebasan dari Diskriminasi	61.25	60.80	60.80

Penjelasan berikut akan menguraikan secara lebih rinci perolehan nilai indeks setiap variabel.

2.2.1 Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Nilai indeks variabel "Kebebasan Berkumpul dan Berserikat" (100,00) disumbang oleh nilai skor dua indikator yang terdapat di dalamnya. Pertama, indikator yang menjelaskan Jumlah Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Pemerintah Daerah Yang Menghambat Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat dengan nilai 100,00. Kedua, skor indikator yang menjelaskan Jumlah Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan Oleh Warga Masyarakat dengan nilai 100,00.

Tabel 2.2.2
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan
Berkumpul dan Berserikat

Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2013	2014	2015
		98.75	100.00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100.00	100.00	100.00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90.00	100.00	100.00

Tabel 2.2.2 memperlihatkan nilai indeks variabel “Kebebasan Berkumpul dan Berserikat” di Provinsi Riau tidak mengalami perubahan pada tahun 2015 dibandingkan dengan skor tahun 2014 yaitu 100,00. Indikator yang berkontribusi terhadap variabel, seperti indikator Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan Oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat dan indikator Jumlah Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat juga tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada nilai 100,00.

Dibandingkan dengan 2014, hasil IDI 2015 mengindikasikan peningkatan perilaku pemerintah daerah yang menggunakan cara-cara dialog dalam komunikasi politik mereka dengan masyarakat. Sementara, perilaku anarkis masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat mengalami relaksasi. Artinya, selama tahun 2015 hak kebebasan warga untuk berkumpul dan berserikat tidak mengalami hambatan.

2.2.2 Variabel Kebebasan Berpendapat

Nilai indeks Variabel "Kebebasan Berpendapat" di Provinsi Riau pada tahun 2015 adalah sebesar 65,29. Dibandingkan dengan IDI 2014, nilai variabel Kebebasan Berpendapat tahun 2015 naik cukup signifikan 29,17 poin, dari 36,12 pada 2014. Peningkatan nilai indeks variabel Kebebasan Berpendapat juga diiringi dengan meningkatnya kualitas kinerja variabel dari kinerja "buruk" pada tahun 2014 menjadi kinerja "sedang" pada tahun 2015.

Nilai yang meningkat tersebut disebabkan oleh nilai skor yang naik pada indikator Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat sebanyak 25 poin di mana nilainya pada tahun 2014 sebesar 33,33 menjadi 65,29 pada tahun 2015. Sementara skor indikator Ancaman/Penggunaan Kekerasan Oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat tidak mengalami perubahan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Skor indikator yang berkontribusi terhadap variabel kebebasan Berpendapat tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.3
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berpendapat

Variabel Kebebasan Berpendapat	2013	2014	2015
	90.00	36.12	65.29
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	90.00	33.33	58.33
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	90.00	50.00	100.00

Peningkatan nilai variabel Kebebasan Berpendapat yang cukup tinggi tersebut mengindikasikan semakin berkurangnya kejadian penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat yang menghambat pemenuhan hak asasi warga terkait dengan kebebasan berpendapat.

2.2.3 Variabel Kebebasan Berkeyakinan

Nilai indeks variabel Kebebasan Berkeyakinan di Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 18,15 poin, dari 82,29 pada tahun 2014 menjadi 64,14 pada tahun 2015. Nilai variabel tersebut didukung oleh skor tiga indikator di dalamnya. Seperti dikemukakan Tabel 2.2.4, penurunan nilai indeks dalam variabel ini terjadi akibat turunnya nilai dari dua indikator, sementara satu indikator lainnya tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.2.4

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berkeyakinan

Variabel	2013	2014	2015
	79.47	82.29	64.14
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya	86.96	86.96	65.22
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	0.00	25.00	0.00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100.00	100.00	100.00

2.2.4 Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

Dibandingkan hasil IDI 2014, nilai indeks variabel “Kebebasan dari Diskriminasi” di Provinsi Riau pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan (lihat Tabel 2.2.5). Nilai variabel tersebut disumbang oleh tiga indikator di dalamnya.

Pertama, nilai indikator tentang Jumlah Aturan Tertulis Yang Diskriminatif Dalam Hal Gender, Etnis Atau Terhadap Kelompok Rentan Lainnya sebesar 0,00 pada tahun 2015. *Kedua*, nilai indikator Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya sebesar 100,00. *Ketiga*, nilai indikator Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya sebesar 100,00.

Tabel 2.2.5

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

Variabel	2013	2014	2015
	61.25	60.80	60.80
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	16.67	0.00	0.00
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	90.00	100.00	100.00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	90.00	100.00	100.00

2.3 Indeks Hak-Hak Politik

Nilai indeks aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau sejak tahun 2013 selalu mengalami peningkatan, yakni dari 52,19 tahun 2013, menjadi 59,74 pada tahun 2014, dan 66,61 pada tahun 2015. Indeks Hak-Hak Politik tahun 2015 meningkat sebesar 6,87 poin dibandingkan tahun 2014. Peningkatan nilai indeks ini di tahun 2015 secara statistik cukup signifikan dan mampu mengubah gambaran kualitas pemenuhan hak-hak politik menjadi kategori “sedang”.

Sebelum tahun 2015 gambaran kualitas pemenuhan hak-hak politik di Riau cukup memprihatinkan. Indeks Hak-Hak Politik yang cukup rendah secara umum menyiratkan kemungkinan adanya stagnasi dalam pemenuhan hak-hak politik. Namun untuk pertama kalinya pada tahun 2015 nilai indeks aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau (66,61) merupakan angka yang paling tinggi dari dua aspek IDI lainnya. Artinya pemenuhan akan hak-hak politik masyarakat Riau sudah mulai menjadi prioritas pemerintah daerah.

Meningkatnya nilai indeks Aspek Hak-Hak Politik pada tahun 2015 tersebut disebabkan oleh naiknya nilai indeks dua variabel yang ada dalam aspek Hak-Hak Politik, yakni “Hak Memilih dan Dipilih” yang nilai indeksnya 75,60, dan “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” yang nilai indeksnya 57,61, lebih rendah dari nilai indeks variabel yang pertama (lihat Tabel 2.3.1).

Tabel 2.3.1

Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik

Variabel	2013	2014	2015
		52.19	59.74
Hak Memilih dan Dipilih	52.85	75.53	75.60
Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat	51.52	43.94	57.61

Di dalam aspek Hak-Hak Politik terdapat dua variabel yakni "Hak Memilih dan Dipilih" yang mempunyai lima indikator dan "Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan" yang mempunyai dua indikator.

2.3.1 Variabel Hak Memilih dan Dipilih

Nilai indeks variabel "Hak Memilih dan Dipilih" di Provinsi Riau pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup besar dibanding nilai indeks pada tahun 2013 yaitu sebesar 22,68 poin, dari 52,85 pada tahun 2013 menjadi 75,53 pada tahun 2014 (lihat Tabel 2.3.2). Nilai variabel tersebut disumbang oleh lima indikator yang terdapat di dalamnya.

Tabel 2.3.2

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Hak Memilih dan Dipilih

Variabel	2013	2014	2015
	52.85	75.53	75.60
Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat	94.23	97.44	97.44
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	50.00	60.00	60.00
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30.00	68.82	68.82
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>)	68.11	69.48	69.48
Jumlah perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi	72.73	92.31	92.31

Empat dari lima indikator dalam variabel "Hak Memilih dan Dipilih" yaitu indikator pertama sampai dengan indikator keempat terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), karena data yang dicari hanya dapat diperoleh pada tahun penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu seperti tahun 2009, data dari empat indikator tersebut dikumpulkan lagi pada tahun 2014 (perkembangannya lihat Grafik 2.3.1).

Indikator *pertama* adalah "Kejadian di mana hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat" dengan skor 97,44 pada tahun 2014, meningkat 3,21 poin dari skor tahun 2009 yaitu 94,23. Artinya jumlah kejadian yang menghambat hak memilih dan dipilih masyarakat semakin berkurang.

Indikator *kedua* adalah "Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat

menggunakan hak memilih” dengan skor 60,00 pada tahun 2014, meningkat 10 poin dari skor tahun 2009 yaitu 50,00. Artinya, pemerintah dapat memfasilitasi kelompok penyandang cacat agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya.

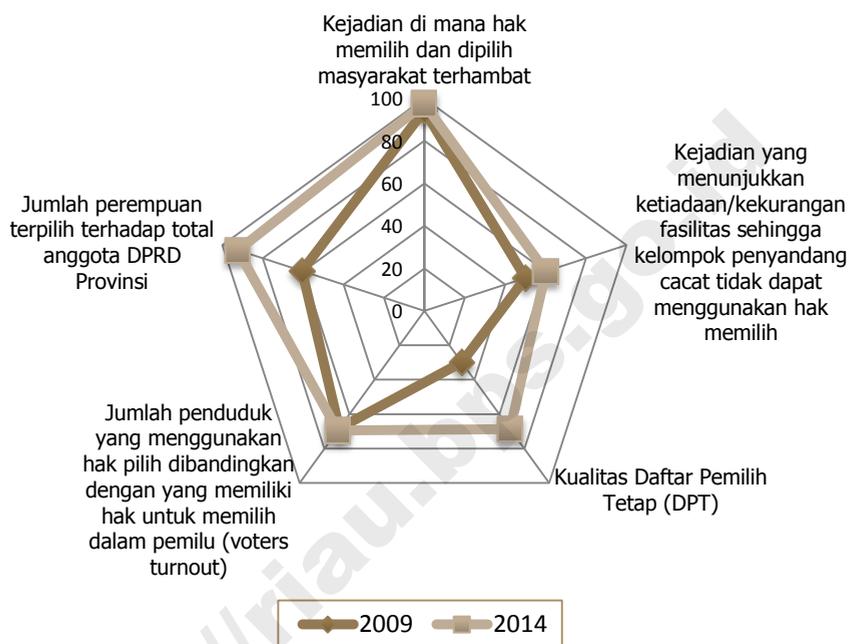
Indikator *ketiga* adalah “Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)” dengan skor 68,82 pada tahun 2014, meningkat 38,82 poin dari skor tahun 2009 yaitu 30,00. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas DPT di Provinsi Riau berada pada kategori “sedang”, namun kualitas DPT Tahun 2014 sudah lebih baik dari kualitas DPT tahun 2009. Peningkatan kualitas DPT tahun 2014 membuat penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik.

Indikator *keempat* adalah “Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*)” dengan skor 69,48 pada tahun 2014, meningkat 1,37 poin dari skor tahun 2009 yaitu 68,11. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat Riau untuk menggunakan hak pilihnya sudah semakin meningkat.

Sedangkan Indikator *kelima*, yakni “Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi” dengan skor 92,31 pada tahun 2015, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2014. Indikator ini merupakan indikator yang pengumpulan datanya dilakukan setiap tahun, tidak terkait dengan tahun penyelenggaraan pemilu. Data dikumpulkan dengan mencatat jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi. Perubahan dalam jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi terjadi karena adanya Pergantian Antar Waktu (PAW).

Grafik 2.3.1

Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel “Hak Memilih dan Dipilih” yang Terkait Pemilihan Umum, Tahun 2009 dan 2014



2.3.2 Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Nilai indeks variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” pada tahun 2015 yaitu 57,61, mengalami peningkatan sebesar 13,67 poin dibandingkan dengan tahun 2014 yang nilainya 43,94 (lihat Tabel 2.3.3). Nilai variabel tersebut disumbang oleh dua indikator yang terdapat di dalamnya.

Dari Tabel 2.3.3 terlihat bahwa penyebab meningkatnya nilai indeks untuk variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan

Pengawasan” adalah naiknya nilai indikator “Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan” sebesar 15,22 poin, dimana nilainya pada tahun 2014 adalah 0,00 dan pada tahun 2015 nilainya menjadi 15,22. Hal ini mengindikasikan semakin berkurangnya jumlah kejadian demonstrasi/mogok yang berujung pada tindak kekerasan.

Tabel 2.3.3

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Variabel	2013	2014	2015
		51.52	43.94
Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	3.04	0.00	15.22
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100.00	87.89	100.00

Selain itu, penyebab turunnya angka indeks variabel “Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan” adalah indikator “Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan” yang nilai indeksnya pada tahun 2015 adalah 100,00, naik 12,11 poin dibandingkan dengan nilai indeks tahun 2014 (87,89).

2.4 Indeks Lembaga Demokrasi

Dibandingkan dengan capaian indeks tahun 2014, secara agregat, aspek Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu sebesar 10,89 poin (dari 74,69 pada tahun 2014 menjadi 63,80 pada tahun 2015), yang artinya capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada

tahun 2015 menempatkan kinerja aspek ini masih pada kategori “sedang”. Penurunan nilai indeks ini perlu dicermati karena untuk pertama kalinya nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi meluncur di angka 60.

Penurunan nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2015, antara lain dapat dijelaskan berdasarkan kontribusi dari nilai indeks masing-masing variabel dan skor indikator pada aspek yang bersangkutan. Secara khusus, bila dicermati distribusi nilai indeks lima variabel pada aspek Lembaga Demokrasi yaitu: “Pemilu yang Bebas dan Adil”, “Peran DPRD”, “Peran Partai Politik”, “Peran Birokrasi Pemerintah”, dan “Peran Peradilan Independen”, terlihat dengan jelas bahwa satu-satunya variabel yang telah memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2015 adalah turunnya capaian indeks variabel “Peran Partai Politik” sebesar 15,98 poin, yaitu dari 100,00 pada tahun 2014 menjadi 84,02 pada tahun 2015 serta turunnya capaian indeks variabel “Peran Birokrasi Pemerintah” sebesar 70,22 poin, yaitu dari 100,00 pada tahun 2014 menjadi 29,78 pada tahun 2015. Sedangkan tiga variabel lainnya yang capaian indeksnya mengalami peningkatan pada tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1

Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi

Variabel	2013	2014	2015
	82.32	74.69	63.80
Pemilu yang Bebas dan Adil	75.83	91.14	91.14
Peran DPRD	35.68	35.96	45.17
Peran Partai Politik	100.00	100.00	84.02
Peran Birokrasi Pemerintah	94.11	100.00	29.78
Peran Peradilan yang Independen	100.00	50.00	78.13

Merujuk pada Tabel 2.4.1, sedikitnya ada tiga poin penting yang menarik untuk digarisbawahi terkait dengan konfigurasi angka-angka indeks variabel pada aspek Lembaga Demokrasi. *Pertama*, walaupun dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 capaian nilai indeks aspek Lembaga Demokrasi cenderung menunjukkan penurunan, dan secara kualitatif, capaian kinerja pada kurun waktu 2014-2015 masih tetap berada pada posisi yang sama, yaitu pada kategori kinerja "sedang". Namun untuk pertama kalinya capaian kinerja Lembaga Demokrasi pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga ke angka 60.

Kedua, walaupun selama tiga tahun terakhir nilai variabel "Peran DPRD" menunjukkan tren meningkat, namun Peran DPRD merupakan satu-satunya variabel yang secara konstan berada pada kategori kinerja "buruk" dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap fluktuasi capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Tahun 2015 juga merupakan tahun dimana capaian indeks terendah terkait variabel ini.

Ketiga, menarik untuk dicatat bahwa variabel "Peran Birokrasi Pemerintah" yang sebelum tahun 2015 selalu berada pada kategori "baik", namun untuk pertama kalinya pada tahun 2015 capaian variabel ini meluncur hingga ke kategori "buruk". Akan tetapi, perubahan capaian yang cukup signifikan ini disebabkan karena adanya perubahan dua indikator yang menyusun variabel tersebut. Penjelasan berikut akan menguraikan secara lebih rinci perolehan nilai indeks setiap variabel.

2.4.1 Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil

Nilai indeks dari variabel "Pemilu yang Bebas dan Adil" di Provinsi Riau pada tahun 2015 adalah 91,14. Nilai ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2014. Hal ini dikarenakan variabel ini terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), karena data yang dicari hanya dapat diperoleh pada tahun penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, variabel ini hanya dikumpulkan pada tahun 2009 dan 2014.

Dua indikator yang menyumbang nilai indeks variabel "Pemilu yang Bebas dan Adil" yaitu: *pertama*, indikator "Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu" di mana nilainya pada tahun 2015 adalah 100,00, sama dengan nilai indikator pada tahun 2014. *Kedua*, indikator "Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara" di mana nilainya pada tahun 2015 adalah 82,28, juga tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2014. Untuk lebih jelasnya, perkembangan variabel "Pemilu yang Bebas dan Adil" dari tahun 2013 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 2.4.2.

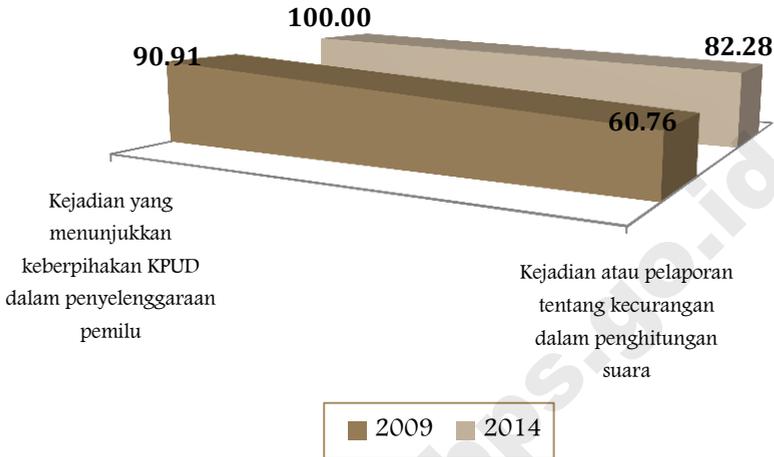
Tabel 2.4.2

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil

Variabel	2013	2014	2015
	75.83	91.14	91.14
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	90.91	100.00	100.00
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	60.76	82.28	82.28

Grafik 2.4.1

Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel "Pemilu yang Bebas dan Adil" yang Terkait Pemilihan Umum, Tahun 2009 dan 2014



2.4.2 Variabel Peran DPRD

Nilai indeks variabel "Peran DPRD" di Provinsi Riau dari tahun 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan. Penyebab meningkatnya nilai indeks variabel "Peran DPRD" pada tahun 2014 hingga tahun 2015 dalam dimensi kuantitatif, dapat dijelaskan oleh capaian skor tiga indikator, di mana satu di antaranya mengalami penurunan, dan dua indikator lainnya mengalami kenaikan (lihat Tabel 2.4.3).

Satu indikator yang mengalami penurunan nilai skor tersebut adalah "Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif" yang mengalami penurunan sebesar 10,71 poin pada tahun 2015, di mana nilai skor indikator pada tahun 2014 adalah 10,71 menjadi 0,00 pada tahun 2015.

Sedangkan indikator yang mengalami kenaikan adalah: (a) "Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan" terjadi kenaikan sebesar 9,02

poin dari tahun 2014 ke tahun 2015; (b) “Jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan” mengalami peningkatan sebesar 33,85 poin dari tahun 2014 ke tahun 2015.

Tabel 2.4.3

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran DPRD

Variabel	2013	2014	2015
	35.96	45.17	35.68
Alokasi anggaran pendidikan terhadap total APBD	45.225	46.78	55.80
Jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	33.33	20.00	53.85
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	3.57	10.71	0.00

2.4.3 Variabel Peran Partai Politik

Nilai indeks variabel “Peran Partai Politik” di Provinsi Riau dari tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami sedikit penurunan sebesar 15,98 poin (lihat Tabel 2.4.4). Dua indikator yang mempengaruhi kenaikan nilai indeks variabel “Peran Partai Politik” adalah: (a) indikator “Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu” yang pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 14,29 poin dibandingkan dengan tahun 2014; (b) indikator “Jumlah Perempuan dalam Kepengurusan Parpol Tingkat Provinsi” yang pada tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar 31,26 poin dibandingkan dengan tahun 2014.

Tabel 2.4.4

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Partai Politik

Variabel	2013	2014	2015
		100.00	100.00
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100.00	100.00	85.71
Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100.00	100.00	68.74

Capaian kinerja variabel "Peran Partai Politik" pada tahun 2015 masih pada level "baik". Demikian juga capaian kinerja untuk dua indikator yang mempengaruhi variabel "Peran Partai Politik", salah satu indikator masih berada pada level "baik" yaitu indikator "Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu" sedangkan indikator lainnya yaitu "Jumlah Perempuan dalam Kepengurusan Parpol Tingkat Provinsi" sedikit turun menjadi level "sedang". Hal ini berarti peran partai politik pada tahun 2013 hingga tahun 2015 sudah menunjukkan hasil yang maksimal dalam memberikan pendidikan demokrasi bagi masyarakat.

2.4.4 Variabel Peran Birokrasi Pemerintah

Nilai indeks dari variabel "Peran Birokrasi Pemerintah" di Provinsi Riau pada tahun 2015 adalah sebesar 29,78, turun secara signifikan sebesar 70,22 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 100,00. Penurunan yang sangat signifikan ini dikarenakan pada tahun 2015 terjadi perubahan indikator yang menyusun variabel tersebut. Dua indikator yang menyusun variabel "Peran Birokrasi Pemerintah" pada tahun 2015 terkait

dengan kebijakan pemerintah daerah dan keterbatasan akses untuk memilih. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 2.4.5.

Tabel 2.4.5
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Birokrasi Pemerintah

Variabel	2013	2014	2015
		94.11	100.00
Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif	98.83	100.00	-
Jumlah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN	-	-	55.26
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif	89.39	100.00	-
Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	-	-	8.33

Dua indikator yang menyumbang nilai indeks variabel "Peran Birokrasi Pemerintah" yaitu: *pertama*, indikator "Jumlah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN" di mana nilainya pada tahun 2015 adalah sebesar 55,26. *Kedua*, indikator "Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih" di mana nilainya pada tahun 2015 adalah sebesar 8,33.

2.4.5 Variabel Peran Peradilan yang Independen

Nilai indeks dari variabel "Peran Peradilan yang Independen" di Provinsi Riau pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan nilai indeks pada tahun 2014, dimana nilai indeks variabel ini pada tahun 2015 adalah 78,13, naik 28,13 poin dari nilai pada tahun 2014 yaitu 50,00. Secara kualitatif, peningkatan nilai indeks ini juga meningkatkan capaian kinerja variabel "Peran Peradilan yang Independen" dari level "buruk" pada tahun 2014 menjadi level "sedang" pada tahun 2015.

Tabel 2.4.6

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Peradilan yang Independen

Variabel	2013	2014	2015
	100.00	50.00	78.13
Keputusan hakim yang kontroversial	100.00	100.00	56.25
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100.00	0.00	100.00

Dua indikator yang menyumbang nilai indeks variabel "Peran Peradilan yang Independen", yaitu: *pertama*, indikator "Keputusan Hakim yang Kontroversial" di mana untuk pertama kalinya pada tahun 2015 nilainya turun sangat signifikan menjadi 56,25. Indikator ini pula lah yang menyebabkan turunnya nilai indeks variabel "Peran Peradilan yang Independen". Secara kualitatif, capaian skor indikator ini mengalami penurunan dari level "baik" pada tahun 2014 menjadi level "buruk" pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja peradilan (penegak hukum) dalam

menyelesaikan berbagai macam kasus pidana di Provinsi Riau perlu mendapat perhatian serius.

Kedua, indikator “Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi” di mana nilainya pada tahun 2015 adalah 100,00, naik 100,00 poin dibandingkan dengan nilai indeks pada tahun 2014 sebesar 0,00 (lihat Tabel 2.4.6). Secara kualitatif, capaian skor indikator ini juga mengalami peningkatan dari level “buruk” pada tahun 2014 menjadi level “baik” pada tahun 2015.

3

KESIMPULAN

<http://riacbps.go.id>

INDIKATOR

2015



Kebebasan Berkumpul dan Berserikat



- Capaian kinerja "Baik"



Kebebasan Berpendapat



- Capaian kinerja "Sedang"



Kebebasan Berkeyakinan



- Capaian kinerja "Sedang"



Kebebasan dari Diskriminasi



- Capaian kinerja "Sedang"



Hak Memilih dan Dipilih



- Capaian kinerja "Sedang"



Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan



- Capaian kinerja "Buruk"



Pemilu yang Bebas dan Adil



- Capaian kinerja "Baik"



Peran DPRD



- Capaian kinerja "Buruk"



Peran Partai Politik



- Capaian kinerja "Baik"



Peran Birokrasi Pemerintah



- Capaian kinerja "Buruk"



Peran Peradilan yang Independen



- Capaian kinerja "Sedang"

Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2015 memperlihatkan gambaran dan kecenderungan perkembangan demokrasi di Provinsi Riau yang penting untuk dicermati. *Pertama*, meskipun dari agregasi capaian keseluruhan aspek dan kualitas demokrasi di Provinsi Riau pada umumnya tergolong pada kategori “sedang”, namun kecenderungan semua aspeknya semakin mendekati batas untuk masuk ke dalam kategori “buruk”. *Kedua*, pada aspek Kebebasan Sipil terjadi pencapaian demokrasi di Riau yang kurang membanggakan. Aspek ini telah menurun sejak tahun 2013 dan masuk kategori “sedang” sejak tahun 2014 (lihat Grafik 2.1.2).

Dapat dipastikan bahwa turunnya nilai indeks aspek Kebebasan Sipil mencerminkan adanya hambatan serius dalam konsolidasi demokrasi di Provinsi Riau. Hambatan tersebut, terlihat dalam upaya pemenuhan hak asasi warga terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kebebasan dari diskriminasi. Hambatan tersebut justru datang dari pemerintah daerah dan aparaturnya berupa tindakan/ Pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya serta adanya aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Selain itu, menurunnya nilai indeks aspek Kebebasan Sipil jelas mengindikasikan defisit demokrasi. Kondisi kebudayaan dan struktur politik belum sepenuhnya demokratis. Secara formal-struktural kita memiliki lembaga demokrasi yang lengkap berupa Pemilu, Partai Politik, Parlemen, Peradilan, tapi masalahnya, nilai-nilai yang melandasi lembaga demokrasi tersebut belum sepenuhnya demokratis. Demokrasi adalah sistem politik yang tujuan akhirnya adalah mempertahankan martabat manusia sebagai warga negara melalui pemenuhan hak-hak sipil dan politik mereka sebagaimana dijamin dalam

konstitusi. Keberhasilan demokrasi terukur dari seberapa jauh pemenuhan hak-hak asasi warga negara sebagai bentuk konkret penghormatan terhadap martabat manusia.

Sementara itu, pada tahun 2015 aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau justru menunjukkan indeks paling tinggi di antara ketiga aspek. Indeks Hak-Hak Politik termasuk ke dalam kategori “sedang” karena nilainya lebih besar dari 60. Naiknya capaian kinerja indeks Hak-Hak Politik disebabkan berkurangnya intensitas demonstrasi yang bersifat kekerasan di Provinsi Riau. Demonstrasi memang merupakan hak politik rakyat dalam demokrasi, namun haruslah dilakukan secara damai karena demonstrasi adalah proses penyampaian aspirasi/ kepentingan rakyat kepada pemerintah. Demokrasi menuntut proses penyampaian itu dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum dan pengrusakan terhadap barang-barang milik publik.

Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, merupakan faktor penyebab lain bagi capaian indeks aspek Hak-Hak Politik. Demokrasi menuntut adanya warga masyarakat yang peka terhadap kepentingan publik dan menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah agar pemerintah dapat memperbaiki hal tersebut. Semakin besar jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat, semakin baik perkembangan demokrasi di Provinsi Riau.

Demikian pula halnya dengan indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2015, merupakan capaian indeks terendah di antara ketiga aspek IDI yang menempatkan kinerja Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau pada kategori “sedang”.

Sedikitnya ada tiga poin penting yang menarik untuk dicatat terkait dengan capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2015, beserta indeks variabel-variabel yang ada di dalamnya. Pertama, walaupun dalam dimensi kuantitatif capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami penurunan, dan walaupun untuk pertama kalinya pada tahun 2015 indeks Lembaga Demokrasi berada pada angka 60, namun secara kualitatif capaian kinerja lembaga demokrasi pada tahun 2014-2015 masih berada pada kategori kinerja "sedang".

Kedua, "Peran DPRD" meskipun pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014, namun variabel ini adalah satu-satunya variabel yang secara konstan berada pada kategori kinerja "buruk" selama periode pengukuran IDI 2013-2015 di Provinsi Riau dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap fluktuasi capaian indeks selama beberapa tahun terakhir pengukuran IDI.

Ketiga, variabel "Peran Birokrasi Pemerintah" adalah variabel yang konsisten dengan capaian indeks tertinggi selama 2009-2014, yang selanjutnya telah memposisikan kinerja dari variabel ini termasuk kategori "baik" pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Namun untuk capaian indeks pada tahun 2015 menurun sangat signifikan yang diakibatkan oleh perubahan indikator yang menyusun variabel tersebut.

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



BPS Provinsi Riau
Jl. Pattimura No. 12 Pekanbaru 28131
Telp. (0761) 23042-21336, Fax : (0761) 21336
E-mail : bps1400@bps.go.id